

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abid, G., Khan, B., Rafiq, Z., & Ahmed, A. (2014). Theoretical Perspectives of Corporate Governance. *Bulletin of Business and Economics*, 166-175.
- Abror, S., & Haryanto. (2014). Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-11.
- Aidt, T., Dutta, J., & Sena, V. (2007). Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence. *Journal of Comparative Economics* 36, 195-220.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2006). *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. New Jersey: Pearson International Edition.
- Asaduzzaman, M., & Virtanen, P. (2016). *Governance Theories and Models*. Springer International Publishing Switzerland.
- Assakaf, E. A., Samsudin, R. S., & Othman, Z. (2018). Public Sector Auditing and Corruption: A Literature Review. *Asian Journal of Finance and Accounting*.
- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). *Governance Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 57-74.
- Elahi, K. Q.-I. (2009). UNDP on Good Governance. *International Journal of Social Economics*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Holmes, S., & Hamilton, J. (2010). *Accounting Theory, 7th Edition*. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi Vol. 11, No. 1*, 1-86.

- Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*.
- Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016). *eProceedings of Management Universitas Telkom*, 1637.
- Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Tesis: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Lessman, C., & Markwardt, G. (2009). One Size Fits All? Decentralization, Corruption, and the Monitoring of Bureaucrats. *CESifo Working Paper No. 2662*.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 163-186.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi*, 18.
- Rini, & Sarah, A. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 73-90.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach*. Chichester: Wiley.
- Sina, L. (2008). Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*.

- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 44-58.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tanzi, V. (1998). *Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*. IMF Staff Papers.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Tuanakotta, T. M. (2012). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utomo, W. P., Diana, N., & Afifudin. (2018). Pengaruh Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Kementerian/Lembaga Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Universitas Islam Malang*.
- Wahyuni, S. (2020). *Metode Penelitian Akuntansi & Managemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wardahayati, Sarwani, & Hayat, A. (2019). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Audit, Serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *National Conference on ASBIS Politeknik Negeri Banjarmasin Vol. 4*.

B. Peraturan dan Dokumen Publik Lainnya

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*.

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Laporan Tahunan*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Laporan Tahunan*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan Tahunan*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.

C. Situs Web

- AyoJakarta. (2020, 06 24). *Ini Daftar Provinsi Paling Korup di Indonesia, DKI Jakarta Nomor 5*. Dipetik 03 21, 2021, dari <https://www.ayojakarta.com/read/2020/06/24/20332/ini-daftar-provinsi-paling-korup-di-indonesia-dki-jakarta-nomor-5>
- BPS Kota Medan. (2019, November 14). *Tabel Statistik Terbaru*. Dipetik Januari 3, 2021, dari <https://www.batamnews.co.id/berita-64292-kpk-ungkap-10-daerah-terkorup-di-ri-kepri-peringkat-6.html>
- Batamnews. (2020, Juni 27). *KPK Ungkap 10 Daerah Terkorup di RI, Kepri Peringkat 6*. Dipetik Oktober 5, 2020, dari <https://www.batamnews.co.id/berita-64292-kpk-ungkap-10-daerah-terkorup-di-ri-kepri-peringkat-6.html>
- Bisnis. (2019, Juni 13). *Bappenas dan Kemenko Perekonomian Bermasalah, Pemerintah Tindak Lanjuti Temuan BPK*. Dipetik Januari 17, 2020, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190613/9/933260/bappenas-dan-kemenko-perekonomian-bermasalah-pemerintah-tindak-lanjuti-temuan-bpk>

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020, Juni 1). *Statistik TPK Berdasarkan Instansi*. Dipetik Oktober 5, 2020, dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020, Juni 01). *Statistik TPK Berdasarkan Wilayah*. Dipetik Oktober 5, 2020, dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah>
- Kompas. (2018, 07 20). *Selama 13 Tahun, 600 Rekomendasi BPK Belum Ditindaklanjuti Pemprov Sumut*. Dipetik 03 22, 2021, dari <https://regional.kompas.com/read/2018/07/20/05380771/selama-13-tahun-600-rekomendasi-bpk-belum-ditindaklanjuti-pemprov-sumut?page=all>
- Kompas. (2019, 04 04). *Terima Suap, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap Divonis 7 Tahun Penjara*. Dipetik 03 21, 2021, dari <https://regional.kompas.com/read/2019/04/04/21362781/terima-suap-bupati-labuhanbatu-pangonal-harahap-divonis-7-tahun-penjara?page=all>
- Kompas. (2020, 11 10). *KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Utara dan Mantan Wabendum PPP sebagai Tersangka*. Dipetik 03 22, 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/17553411/kpk-tetapkan-bupati-labuhanbatu-utara-dan-mantan-wabendum-ppp-sebagai>
- Medcom. (2019, April 10). *Sumut Provinsi Terkorup Di Indonesia*. Dipetik Oktober 4, 2020, dari <https://www.medcom.id/nasional/hukum/8N0MQgEb-sumut-provinsi-terkorup-di-indonesia>